

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah proses di mana anak-anak membangun pengetahuan dan pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungannya (Jean Piaget, 1980). Lev Vygotsky (1978), dalam bukunya yang berjudul “Mind in Society”, juga memaparkan definisi yang serupa, yaitu pendidikan adalah proses sosial di mana anak-anak belajar melalui interaksi dengan orang dewasa atau teman sebaya mereka. B.F. Skinner (1953) turut menyampaikan hasil pemikirannya dan mendefinisikan pendidikan sebagai proses pembentukan perilaku seseorang melalui penguatan positif dan negatif. Secara umum, para ahli memandang pendidikan sebagai proses pengembangan diri dan potensi individu yang melibatkan interaksi dengan lingkungannya untuk mencapai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan individu dalam mewujudkan implementasi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Pendidikan merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945, yaitu “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Selain menjadi hak warga negara, pendidikan juga merupakan salah satu kewajiban yang harus diberikan oleh negara. Setiap anak sudah seharusnya mendapatkan pendidikan tanpa terbatas pada kondisi tertentu, anak dengan disabilitas, keterbatasan secara fisik, dan keterbatasan ekonomi sekalipun tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak melalui penerapan sistem pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan bagi seluruh peserta didik yang memiliki kelainan tertentu untuk mengikuti pembelajaran bersama dengan siswa pada umumnya (Permendiknas No. 70 Tahun 2009). Pendidikan inklusi memiliki tujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, serta menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif (Nurhayati, 2012). Penyelenggaraan pendidikan inklusi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan. Namun pada praktiknya, masih terdapat banyak kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, seperti

kurangnya pemahaman para guru terkait cara menangani murid berkebutuhan khusus, kurangnya tenaga pendidik yang memadai, dan interpretasi yang kurang tepat mengenai pendidikan inklusi (Hanifah, 2022). Guru sebagai tenaga pendidik tentunya memiliki peran yang sangat penting terhadap pembelajaran murid di kelas. Selain mengajar, guru juga bertugas untuk membimbing, melatih, dan mendidik murid-muridnya (Winesa, 2020). Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya dengan memberikan pelatihan kepada para guru serta mendatangkan guru pembimbing khusus (GPK) yang tentunya lebih memiliki pengalaman dan pengetahuan seputar penanganan murid berkebutuhan khusus.

Sekolah inklusi adalah sekolah di mana siswa berkebutuhan khusus belajar di kelas yang sama dengan siswa reguler dan diberi dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka agar tercapai hasil yang efektif, baik secara akademik maupun sosial (Tejena, 2022). Pendidikan inklusi memberikan kesempatan yang setara antara siswa berkebutuhan khusus dan siswa lainnya untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama (Amalia, 2022). Pernyataan tersebut juga sejalan dengan tujuan pendidikan inklusi yang dinyatakan oleh UNESCO, yaitu untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang secara akademik, sosial, dan emosional dalam lingkungan pendidikan yang sama. Dalam sekolah inklusi, siswa berkebutuhan khusus akan dididik bersama dengan siswa lainnya di dalam kelas yang sama menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran. Implementasi sekolah inklusi di semua jenjang pendidikan dapat memberikan manfaat bagi anak berkebutuhan khusus dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pendidikan inklusi harus diterapkan di setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas (Saleh, 2017).

Pendidikan inklusi diterapkan pada semua jenjang pendidikan karena memberikan banyak manfaat, seperti membantu mengurangi diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus, menumbuhkan toleransi antarsiswa, hingga memberikan pengalaman belajar yang lebih positif. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) cenderung lebih banyak pada tingkat SMP daripada SMA, dengan rincian yaitu sebanyak 23.497

PDBK di SMP dan 11.785 di SMA/Sederajat. Hal ini juga yang mendasari mengapa penelitian terkait pendidikan inklusif di tingkat SMP menjadi semakin penting. Di sekolah menengah pertama (SMP), pendidikan inklusi membantu siswa untuk membangun keterampilan sosial dengan terlibat dalam kegiatan bersama teman sebayanya, serta keterampilan emosional sebagai tahap perkembangan yang lebih kompleks (Choi, 2020). Meskipun demikian, pendidikan inklusi juga memiliki tantangan yang beragam. Tahap perkembangan remaja awal dengan rentang usia 12-15 tahun, atau setara dengan jenjang SMP, dapat dianggap sebagai tahap perkembangan transisi sehingga individu mengalami perubahan yang signifikan, baik secara fisik, intelektual, maupun emosional (Jannah, 2016). Siswa pada jenjang SMP berada pada tahap perkembangan yang lebih kompleks, terutama dalam aspek perkembangan kognitif dan sosial (McLaughlin, 2015). Di tahap ini siswa mulai mencari identitas diri sehingga perubahan emosi secara signifikan akan terjadi, siswa juga akan menghadapi kompleksitas tugas akademik yang lebih tinggi sehingga sangat diperlukan peran guru dalam memahami kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, sesuai dengan hasil *preliminary study*, para guru menunjukkan adanya kesulitan untuk memberikan pengajaran yang efektif di kelas. Hal ini tentunya dapat menyebabkan kondisi *teacher well-being* mereka terganggu.

Collie (2015) mendefinisikan *teacher well-being* sebagai kondisi fisik, psikologis, dan sosial yang positif, yang memungkinkan guru untuk merasa bahagia, sehat, dan produktif dalam melakukan pekerjaannya. Konsep ini melibatkan berbagai aspek seperti kesehatan mental dan fisik, kepuasan kerja, motivasi, dukungan sosial, serta keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (*work-life balance*). Pemilihan variabel *teacher well-being* didasari oleh beberapa pertimbangan, seperti adanya kaitan antara *teacher well-being* dengan kepuasan kerja, produktivitas, dan efektivitas guru dalam mengajar (Winesa, 2020). *Teacher well-being* juga berkontribusi pada *student well-being* dan prestasi akademik peserta didik (McCallum, Price, Graham, & Morrison, 2017). Selain itu, *teacher well-being* dapat memengaruhi bagaimana guru melaksanakan tugasnya dengan memberikan pengajaran yang efektif di kelas, di mana hal ini berimplikasi secara langsung terhadap kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Tingkat *teacher well-being* yang rendah dapat memberikan dampak buruk pada performa guru saat mengajar di kelas dan tidak tercapainya kepuasan kerja (Fachrurrozy, 2022).

Penelitian mengenai *teacher well-being* dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kondisi *well-being* yang baik karena dapat memengaruhi berbagai aspek dalam lingkungan pendidikan. Sekolah inklusi dan *teacher well-being* merupakan dua aspek penting dalam pendidikan yang memiliki dampak signifikan terhadap proses pembelajaran di kelas. *Teacher well-being* mencakup kesehatan mental dan fisik guru secara keseluruhan, dan memiliki pengaruh yang besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Beban kerja yang tinggi yang dialami oleh guru SMP inklusi tentunya akan memengaruhi kondisi *well-being* guru tersebut (Collie, 2015). Ketika guru mengalami stres, hal ini dapat berdampak negatif pada kemampuan mereka untuk mengajar secara efektif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jennings & Greenberg (2009) menunjukkan bahwa guru dengan tingkat stress yang tinggi lebih berpotensi mengalami gejala depresi, kecemasan, bahkan penyakit fisik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan tingkat kepuasan kerja pada guru yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pendidikan yang diterima siswa. Sebaliknya, guru yang menerima dukungan sosial dengan baik dan memiliki akses terhadap sumber daya untuk mengelola stress, dapat menjaga *well-being* mereka sehingga proses pembelajaran yang efektif dapat tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Collie dkk. (2015), terdapat tiga faktor utama yang dapat memengaruhi *teacher well-being*, yaitu *workload*, *organizational*, dan *student interaction*. Beban kerja (*workload*) yang terlalu banyak harus ditanggung guru dapat menyebabkan stress dan *burnout*. Faktor organisasional digambarkan oleh kondisi lingkungan kerja, dukungan dari rekan kerja dan pimpinan, serta kejelasan peran dan harapan yang dimiliki guru. Faktor interaksi dengan siswa mencakup kualitas hubungan antara guru dan siswa, dukungan sosial dari siswa, dan rasa kepuasan dalam bekerja. Guru memiliki peran serta tanggung jawab yang besar dalam membentuk masa depan masyarakat dengan memberikan pendidikan kepada generasi penerus bangsa. Namun, mereka mengalami banyak tantangan dalam menjalankan tugasnya, diantaranya yaitu beban kerja yang tinggi, tekanan untuk memenuhi standar akademik, dan berurusan dengan siswa dan orang tua yang tidak kooperatif (Wibowo, 2015). Tantangan tersebut tentunya akan memengaruhi *well-being* mereka sehingga dapat memengaruhi kualitas pengajaran, kinerja guru, dan keberhasilan siswa dalam belajar. Seorang guru harus memiliki kondisi *well-being* yang baik agar dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal, guru dengan tingkat *well-being* yang kurang baik dapat

memengaruhi standar pengajaran di kelas dan dapat berujung pada tidak tercapainya proses pembelajaran yang ideal (Nadia, 2021). Beberapa faktor yang dapat memengaruhi *well-being* seseorang diantaranya adalah dukungan sosial, kebersyukuran, *forgiveness*, kepribadian, *self-esteem*, dan spiritualitas (Dewi & Nasywa, 2019). Penelitian ini akan memfokuskan bahasannya pada faktor kepribadian sebagai salah satu aspek yang memiliki keterkaitan dengan tingkat *well-being* guru.

Guru yang mengajar di sekolah menengah pertama inklusi tentunya memiliki tantangan yang lebih besar karena pada tahap perkembangan ini siswa mengalami banyak perubahan fisik dan psikologis (Johnson, 2019). Siswa SMP juga mulai memiliki kemampuan berpikir yang lebih kompleks sehingga guru perlu memahami kebutuhan dan karakteristik tiap siswa untuk dapat mengajar dengan efektif. Selain menghadapi perubahan psikologis dan kognitif siswa SMP, guru yang mengajar di sekolah inklusi juga harus menangani siswa berkebutuhan khusus. Terlebih lagi, terdapat tantangan lain yang juga harus dihadapi, seperti perbedaan latar belakang siswa dan tingkat kemampuan yang beragam. Hal ini tentunya merupakan tantangan bagi guru yang dapat memicu terjadinya stres. Guru juga mungkin merasakan tekanan dalam memenuhi kebutuhan siswa di SMP inklusi, yang dapat menyebabkan perasaan jenuh serta merasakan beban kerja yang berat. Selain itu, seorang guru juga tidak selalu mendapatkan dukungan sosial dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mengajar secara efektif di sekolah inklusi. Hal ini dapat memicu perasaan frustrasi dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan mereka. Kesulitan lain yang mungkin dialami oleh para guru adalah kurangnya pelatihan atau pengembangan profesional terkait pendidikan inklusi yang selanjutnya dapat berdampak pada *well-being* mereka. Penting bagi sekolah dan instansi terkait untuk memberikan guru dukungan, fasilitas, serta sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai upaya untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di kelas, serta untuk memprioritaskan kondisi *well-being* para tenaga pendidik.

Preliminary study yang dilakukan untuk mengamati fenomena terkait *teacher well-being* pada guru yang mengajar di SMP inklusi menunjukkan hasil yang sejalan dengan penjelasan di atas. *Preliminary study* atau penelitian pendahuluan umumnya dilakukan untuk menganalisis masalah utama yang mendasari penelitian, *preliminary study* juga dilakukan sebagai kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pedoman

dalam melaksanakan penelitian. Metode *preliminary study* dilakukan dengan mengunjungi sekolah inklusi, yaitu SMP yang menerima siswa berkebutuhan khusus, kemudian mewawancarai dua orang guru yang merupakan wali kelas dari ABK di sekolah tersebut. Menurut keterangan salah satu narasumber, sistem penerimaan ABK di SMP negeri sama dengan siswa lainnya yaitu melalui situs Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur khusus murid inklusi dengan melampirkan surat keterangan kondisi psikologis anak. Tidak ada regulasi atau ketentuan yang mengatur kriteria ABK yang diperbolehkan mendaftar karena verifikasi akan dilakukan secara otomatis oleh sistem PPDB. Siswa ABK yang mendaftar juga harus melampirkan surat keterangan psikologis dari rumah sakit. Dalam kasus ini, keterbatasan yang dialami oleh ABK di sekolah tersebut yaitu berupa IQ (*Intelligence Quotient*) atau tingkat kecerdasan yang rendah, hal ini ditandai dengan rendahnya daya tangkap siswa dalam memahami pembelajaran di kelas dan kesulitan dalam berinteraksi, baik dengan guru maupun teman sebayanya. Berdasarkan keterangan narasumber, seluruh sekolah negeri, baik SD, SMP, maupun SMA, wajib menerima siswa berkebutuhan khusus sebanyak minimal dua orang. Narasumber juga menyatakan bahwa sekolah inklusi negeri dapat menjadi solusi bagi ABK yang berasal dari keluarga dengan tingkat perekonomian rendah.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 10 ayat 1 tertulis bahwa “Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif”. Namun berdasarkan keterangan narasumber, pada kenyataannya tidak ada GPK sebanyak minimal satu orang sebagaimana tertulis dalam peraturan tersebut. Penjelasan tersebut juga sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Yaswardi, Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikbud, yang menyatakan bahwa kondisi pendidikan inklusif saat ini masih sangat kekurangan Guru Pembimbing Khusus (GPK) karena keterbatasan anggaran dan SDM. Di antara 32.623 jumlah sekolah inklusif dan 109.086 siswa berkebutuhan khusus, hanya terdapat 5.144 GPK atau sekitar 16% (Dapodik, 2020). Narasumber menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memberikan alternatif solusi berupa seminar atau *workshop* yang diselenggarakan oleh pihak P2KPTK2 dengan topik pembahasan seputar pendidikan inklusi, seperti cara menangani siswa ABK dan penyesuaian indikator penilaian.

Narasumber lainnya menyatakan bahwa dalam memberikan penilaian kepada ABK, guru menentukan silabus dan standar kompetensinya sendiri. Sebagai guru yang mengajar siswa berkebutuhan khusus, guru harus kreatif dalam melakukan modifikasi proses pembelajaran dan standar penilaian agar sesuai dengan kemampuan siswa ABK. Kurikulum merdeka, yang menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada pihak sekolah, juga memungkinkan para guru untuk mengembangkan praktik penerapan aturan dengan tetap mengacu pada standar yang sudah ditetapkan. Terkait proses pembelajaran di kelas, biasanya guru akan memberi penjelasan materi secara terpisah (*private*) kepada ABK menggunakan penjelasan yang lebih sederhana dalam bentuk visual sehingga dapat lebih mudah dimengerti oleh siswa ABK. Kendala lain yang disampaikan oleh narasumber dalam proses mengajar ABK yaitu membutuhkan pemahaman, juga *treatment* khusus dalam proses pembelajaran yang tentunya akan memakan waktu, sedangkan guru juga harus memberikan pengajaran dan perhatian kepada murid lainnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 11 menyebutkan bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan, diperlukan bentuk akomodasi yang layak berupa ketersediaan aksesibilitas menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk bidang miring, lift, dan/atau bentuk lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, kedua narasumber mengatakan bahwa belum terdapat fasilitas yang memadai sesuai dengan standar yang tertera pada peraturan pemerintah tersebut. Sekolah inklusi negeri memiliki keterbatasan dalam fasilitas yang tersedia, murid penyandang tuna netra dan disabilitas fisik yang melakukan mobilitasnya dengan kursi roda tetap membutuhkan fasilitas dan penanganan khusus yang tidak tersedia pada sebagian besar sekolah inklusi negeri. Hal tersebut membuktikan bahwa fasilitas yang saat ini tersedia di sebagian besar sekolah negeri belum dapat menunjang seluruh ragam penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pendidikan karena adanya keterbatasan prasarana. Kedua narasumber juga sepakat bahwa saat ini pemerintah belum sepenuhnya siap dalam menerapkan pendidikan inklusi pada sekolah negeri. Menurut narasumber pertama, di sekolah negeri, ABK tidak bisa terakomodasi dengan optimal karena para guru sudah memiliki tantangan dan kesulitannya masing-masing dalam mengajar siswa reguler. Narasumber kedua juga mengatakan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung di kelas akan lebih mudah terlaksana apabila seluruh murid memiliki kondisi (*daya tangkap*) yang sama karena guru

dapat lebih memfokuskan pengajaran kepada murid secara menyeluruh tanpa harus memberikan *treatment* khusus kepada ABK.

Selain lingkungan kerja, *workload*, dan dukungan sosial, salah satu faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat *well-being* guru adalah faktor kepribadian. Penelitian yang dilakukan oleh Macovei (2023) menunjukkan bahwa trait kepribadian dapat menggambarkan kondisi *teacher well-being*. Trait kepribadian seperti *extraversion* dan *conscientiousness* (kesadaran) terbukti dapat memprediksi efektivitas pengajaran dan kondisi *well-being* guru. *Big 5 personality* pertama kali dibentuk oleh D. W. Fiske pada tahun 1949 yang kemudian dikembangkan oleh peneliti lain, diantaranya Norman (1967), Smith (1967), Goldberg (1981), dan McCrae & Costa (1987). Teori kepribadian ini merupakan salah satu teori kepribadian yang paling sering digunakan dalam berbagai penelitian dan sudah diakui secara luas (Ernst-Linke, 2022). *Big 5 personality* adalah teori kepribadian yang mengkategorisasi kepribadian manusia ke dalam lima dimensi, yaitu *openness to experience*, *conscientiousness*, *extraversion*, *agreeableness*, dan *neuroticism*. *Openness to experience* (keterbukaan) merujuk pada rasa ingin tahu yang tinggi dan cenderung suka mencoba hal-hal baru. *Conscientiousness* (kesadaran) merujuk pada tingkat tanggung jawab, disiplin, dan ketekunan guru yang digambarkan dengan karakteristik tegas dan fokus pada tujuan. *Extraversion* (ekstrovertisme) merujuk pada rasa percaya diri dan kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, guru dengan trait ekstrovert cenderung bersemangat dan mudah beradaptasi. *Agreeableness* (kesopanan) merujuk pada tingkat kerjasama dan rasa empati, trait ini digambarkan oleh karakteristik guru yang cenderung sopan, santun, dan seringkali memprioritaskan kepentingan orang lain. *Neuroticism* (ketidakstabilan emosi) merujuk pada tingkat kecemasan dan ketidakstabilan emosi, guru dengan tingkat neurotisme yang tinggi cenderung mudah gelisah, cemas, dan sulit mengatasi stres. Penelitian yang diterbitkan oleh J. M. Innes (1989) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *extraversion* dan *neuroticism* dengan stress yang dialami guru, trait kepribadian *extraversion* memiliki korelasi yang positif dengan stress guru, sedangkan *neuroticism* memiliki korelasi negatif dengan stress guru (Eysenck, 1973). Penelitian lain yang diterbitkan oleh Pretsch (2012) membahas tentang *neuroticism* sebagai mediator antara resiliensi kerja dengan *teacher well-being*, di mana individu dengan tingkat *neuroticism* yang rendah diasumsikan memiliki resiliensi yang tinggi dan memiliki tingkat *teacher well-being* yang tinggi pula.

Dengan demikian, memahami trait kepribadian guru dapat membantu dalam meningkatkan *teacher well-being* mereka.

Keterangan yang disampaikan oleh kedua narasumber menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara aktivitas guru mengajar di sekolah inklusif dengan tingkat *well-being* mereka. Hal tersebut juga digambarkan melalui pernyataan yang disampaikan oleh para guru yang menyatakan bahwa murid ABK seharusnya mendapatkan akses pendidikan dari SLB dan pernyataan bahwa proses pembelajaran akan lebih mudah dilakukan apabila semua murid memiliki tingkat pemahaman yang setara. Berbagai kesulitan yang dihadapi oleh para guru, seperti terbatasnya tenaga GPK, kurangnya pengetahuan guru terkait cara menangani murid ABK, adanya keterbatasan waktu dalam proses mengajar murid ABK secara terpisah, dan masih banyak kendala lainnya, tentu dapat memberikan beban kerja yang tinggi sehingga berujung pada terganggunya kondisi *well-being* mereka. Oleh karena itu, fenomena yang sudah dipaparkan akan ditinjau lebih lanjut dalam penelitian ini berdasarkan aspek kepribadian, yaitu trait kepribadian *Big 5 Personality* sebagai variabelnya. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana faktor trait kepribadian *big 5 personality* memiliki keterkaitan dengan *teacher well-being*. Dalam penelitian ini, kelima dimensi *big 5 personality* (*openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism*) akan diukur dan dianalisis untuk melihat hubungannya dengan faktor-faktor yang memengaruhi *teacher well-being*, seperti beban kerja (*workload*), interaksi dengan siswa (*student interaction*), dan dukungan organisasi (*organizational*). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan *well-being* guru yang mengajar di sekolah menengah pertama inklusif.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang fenomena yang telah dipaparkan di atas, penulis menetapkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran trait kepribadian *big 5 personality* pada guru yang mengajar di SMP inklusif?
2. Bagaimana gambaran *teacher well-being* pada guru yang mengajar di SMP inklusif?

3. Apakah terdapat hubungan antara trait kepribadian *big 5 personality* dengan *teacher well-being* pada guru yang mengajar di SMP inklusif?

1.3 Pembatasan Masalah

Setelah mengidentifikasi masalah yang akan dikaji maka penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai “Hubungan Trait Kepribadian *Big 5 Personality* dengan *Teacher Well-Being* di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Inklusif”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang sudah dipaparkan di atas, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah terdapat hubungan antara trait kepribadian *openness to experience* dengan *teacher well-being* pada guru yang mengajar di SMP inklusif?
2. Apakah terdapat hubungan antara trait kepribadian *conscientiousness* dengan *teacher well-being* pada guru yang mengajar di SMP inklusif?
3. Apakah terdapat hubungan antara trait kepribadian *extraversion* dengan *teacher well-being* pada guru yang mengajar di SMP inklusif?
4. Apakah terdapat hubungan antara trait kepribadian *agreeableness* dengan *teacher well-being* pada guru yang mengajar di SMP inklusif?
5. Apakah terdapat hubungan antara trait kepribadian *neuroticism* dengan *teacher well-being* pada guru yang mengajar di SMP inklusif?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara trait kepribadian *big 5 personality* dengan *teacher well-being* pada guru yang mengajar di SMP inklusif.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi bahan referensi untuk pengembangan kajian ilmu psikologi, terutama dalam bidang psikologi pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan

penelitian selanjutnya agar lebih optimal dalam membahas keterkaitan antara *big five personality* dengan *teacher well-being*.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta perspektif baru terkait hubungan *big five personality* dengan *teacher well-being* kepada para pembacanya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan *awareness* terkait pentingnya *teacher well-being*, serta membantu para guru untuk memahami lebih dalam mengenai *teacher well-being*.

